

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintah oleh rakyat. Demokrasi mengutamakan kepentingan rakyat dan menerima pendapat dan pandangan dari rakyat. Arti demokrasi adalah sebuah ide mengenai wajah pokok demokrasi yang relevan dengan dunia dewasa ini dan pemahaman mengenai bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan budaya mempengaruhi kualitas demokrasi dalam suatu negara.¹

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di benua Afrika yang memiliki tanah yang subur dan kekayaan sumber daya mineral. Afrika Selatan merupakan negara dengan tingkat produksi berlian dan emas sebaik metal dan platinum.² Selain itu negara ini memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari penduduk asli yang identik dengan kulit hitam (19 juta jiwa) dan imigran yang berkulit putih (4,5 juta jiwa). Orang kulit putih yang mayoritas berasal dari benua Eropa dan ada pula golongan kulit berwarna yang berasal dari benua Asia.

¹Georg Sorensen, 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Edisi II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1.

²*The History of Apartheid in South Africa* diakses dalam <http://www-cs-students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html> (01/06/2015, 12:13 WIB)

Kehadiran orang kulit putih di Afrika Selatan dimulai ketika Inggris dan Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner³ memasuki wilayah Afrika Selatan karena melihat potensi keuntungan dari wilayah tersebut dimana terdapat cadangan berlian yang melimpah. Hal ini memicu perebutan wilayah oleh Inggris dan Belanda untuk menduduki Afrika Selatan. Sehingga perang antara Britania dengan Belanda tak dapat dihindari lagi. Pada abad ke-17 Afrika mulai menjadi wilayah koloni dari Inggris dan Belanda. Namun Pada tahun 1931 Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya. Namun kemudian Inggris harus membagi wilayahnya dengan pihak Afrikaner dan pembagian kekuasaan itu berlanjut hingga tahun 1940 saat partai nasional yang pro dengan para Afrikaner memperoleh mayoritas tempat di parlemen.

Apartheid merupakan sebutan untuk pemisahan antara kulit putih dengan kulit hitam secara wilayah sampai dengan sistem secara keseluruhan yang diterapkan oleh kaum kulit putih. Hukum apartheid sudah sejak tahun 1930 diberlakukan oleh para pendatang dari Eropa.⁴ Apartheid itu sendiri berasal dari bahasa Afrikaans bermakna *apart* yakni memisah, dan *heid* yang berarti sistem atau hukum. Sistem pemisahan ras di Afrika Selatan ini yang disahkan oleh para kaum kulit putih saja tanpa melibatkan rakyat pribumi tentu semakin mempertegas dominasi dan kekuasaan kaum kulit putih baik secara sosial maupun dalam pemerintahan. Sekitar 80% wilayah negara itu dimiliki warga kulit putih. Sedangkan warga kulit hitam ditempatkan di wilayah termiskin yang disebut

³Afrikaner adalah kelompok etnis di Afrika selatan yang merupakan bangsa Belanda dan Inggris yang tiba pada abad ke-17 dan ke-18 dan menguasai agrikultur dan politik Afrika Selatan, diakses dalam <http://www.dictionary.com/browse/afrikaner?s=t> (26/04/2016, 12:06 WIB)

⁴*The history of apartheid in south africa, Op. Cit.,*

sebagai *homelands* atau tanah air.⁵ Mereka memiliki semacam pemerintahan administrasi mandiri. Warga kulit hitam secara ekonomi, sosial dan politik terabaikan.

Salah satu tokoh pribumi yang memiliki peran besar dalam menentang apartheid yaitu Nelson Mandela. Perjuangannya dalam menyuarakan anti-apartheid⁶ Nelson Mandela sampai keluar masuk penjara untuk sekian kalinya disebabkan penentangan yang selalu dilakukannya. Terbukti perjuangan panjang Nelson Mandela dalam anti-apartheid membuahkan hasil. Pada sekitar tahun 1990, karena dorongan masyarakat dunia dan tekanan dari bangsa lain serta tekanan dari gerakan anti-apartheid khususnya *Africa National Congress (ANC)*, presiden yang menjabat saat itu yakni F.W. de Klerk menarik kembali larangan terhadap kongres nasional Afrika dan partai-partai politik berhaluan kiri. Nelson Mandela pun dibebaskan dari penjara, dan sejak saat itu undang-undang apartheid mulai dihapus secara perlahan hingga pada 1994 untuk pertama kalinya pemilu digelar tanpa diskriminasi ras di Afrika Selatan.⁷ Partai ANC kemudian meraih kemenangan besar dengan Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan.

Ketika dimulainya penghapusan undang-undang apartheid dan kekuasaan telah berada di tangan kulit hitam, berjuta penduduk yakni mayoritas kulit hitam masih hidup dalam kemiskinan.⁸ Sejak 1994 Pemilu yang bersih tanpa

⁵Aditya P. Christian, *Peran Nelson Mandela dalam Gerakan Anti-Apartheid di Afrika Selatan 1994–1999*, Universitas Pembangunan Nasional, diakses dalam [http://eprints.upnjatim.ac.id/6470/\(26/04/2016,08:19 WIB\)](http://eprints.upnjatim.ac.id/6470/(26/04/2016,08:19%20WIB))

⁶ Anti-Apartheid sebutan dari kelompok individu yang kontra terhadap apartheid, diakses dalam http://www.unigal.ac.id/fkip/sejarah/userfiles/file/Jurnal%20Artefak/Vol_%201_%20No_%201_%20Januari%20Tahun%202013/2_%20E-Jurnal-Agus%20Budiman.pdf (26/04/2016,09:04 WIB)

⁷*South African history: the death of apartheid : First democratic elections* diakses dalam <http://www.southafrica.info/about/history/521109.htm#.VX2JBfmqqko> (01/06/2015,02:06 WIB)

⁸ Cottrell, Robert c. 2005 .*South Africa a State of Apartheid*. Chelsea House Publishers.hal. 72

diskriminasi telah dilakukan dan demokrasi mulai menunjukkan keberadaannya di negara ini. Namun demokratisasi yang tidak selalu berjalan mulus masih menyisakan masalah-masalah yang menyangkut hidup orang banyak negeri ini. Setelah usainya era apartheid, hal yang menjadi fokus dan mendapat perhatian yakni kejahatan dan reformasi di badan kepolisian. Kriminalitas masih tinggi di Afrika Selatan dikarenakan standar hidup mayoritas pribumi yakni kulit hitam masih memprihatinkan. Kepolisian juga menjadi perhatian dimana sejak era apartheid sampai pasca apartheid itu sendiri, polisi selalu melakukan tindak aksi kekerasan dalam tugasnya sebagai aparat keamanan. Hal ini tentu menjadi miris karena instansi pemerintah yang semestinya menjaga keamanan negara justru menciptakan situasi yang tidak kondusif.

Dampak-dampak sosial sangat terlihat pasca apartheid di Afrika Selatan, kenyataan yang terjadi selepas Apartheid hanyalah golongan yang berada yakni berasal dari kalangan kulit putih yang menguasai mall-mall, industri, transportasi, dan perdagangan. Sedangkan kaum kulit hitam tetap saja susah hidup dan menderita, baik golongan kulit hitam maupun segelintir orang kulit putih.⁹ Fenomena yang terjadi pada tahun 2008, setiap rumah dilengkapi oleh pintu garasi yang dapat dibuka tutup secara otomatis oleh *remote control* dari dalam mobil. Kalau pintu sedang bergerak membuka atau menutup, segera penduduk asli Afrika Selatan yang hitam berambut kribu menjalurkan tangannya ke celah-celah pintu besi garasi seraya berteriak: "*Madame, sir, help me please, I am hungry*". Dalam keadaan begini, sebaiknya serahkan sumbangan secepatnya. Begitu mobil lepas

⁹Basri, T. Hasan. 2006. *Afrika Selatan: Catatan Sebuah Perjalanan di Bumi Nelson Mandela*. Humaniora. Hlm 18

dari garasi menuju jalan raya, pencet segera *remote control* penutup pintu, dan baru tancap gas setelah pintu garasi terkunci.¹⁰

Bila berbicara dengan orang kulit putih warga Afrika Selatan, mereka mengatakan bahwa, dulu rumah-rumah mereka tidak dipagari. Batas halaman rumah hanya ditandai oleh tanaman hias seperti kembang aneka warna dan pepohonan. Begitu sistem *apartheid* hilang, khalayak kulit hitam masuk sampai kepintu-pintu untuk meminta-minta. Bila jendela renggang, tangan-tangan mereka menjalur kedalam rumah minta dikasihani. Melapor ke polisi akan sia-sia karna jumlahnya yang banyak dan terus bertambah.¹¹

Dampak sosial lain yang terlihat adanya *Xenophobia* yang melanda masyarakat Afrika Selatan yang kurang sejahtera pasca *apartheid*. Pada tahun 2008, muncul sebuah gerakan radikal terhadap para imigran yang disebut *Xenophobia*. *Xenophobia* dapat diartikan sebagai bencian atau ketakutan kepada orang asing (*hatred or fear of foreigners*). Masuknya warga asing yang berasal dari negara tetangga yaitu Zimbabwe, Malawi, dan Mozambique serta negara disekitar yang lainnya. ketakutan dan kebencian terhadap warga asing tersebut telah mengakibatkan masyarakat Afrika Selatan bertindak radikal dengan melakukan kekerasan dan kerusuhan kepada para imigran sehingga lebih dari 70 orang meninggal dan menyebabkan sekitar 120.000 orang bermigrasi pada mei 2008.¹² Salah satu penyebab terjadinya *Xenophobia* ialah kondisi kekurangan lapangan pekerjaan yang melanda masyarakat Afrika Selatan, dan ditengah

¹⁰Ibid. Hlm 16

¹¹Ibid. Hlm 17

¹²Norman Duncan, *Reaping the whirlwind: Xenophobic violence in South Africa*, University of the Witwatersrand, Johannesburg South Africa, diakses dalam <http://www.gicpp.org/pdfs/V3i1-0011%20Duncan.pdf> (30/04/2017,13:37 WIB)

sulitnya mencari pekerjaan dan masuknya warga asing dari negara lainnya menjadi pemicu munculnya sentimen terhadap pendatang dan pekerja asing.

Fenomena yang terjadi di Afrika Selatan, meski era apartheid telah berakhir dan menjadi sejarah namun masih banyak permasalahan sosial yang masih membekas pasca apartheid tersebut. Demokratisasi merupakan proses panjang yang menjadi tantangan bagi Afrika Selatan sebab demokrasi yang ideal tidak hanya dipahami secara prosedural tetapi secara substansial. Oleh karena itu dalam tulisan ini peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca Apartheid.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid studi pada konflik *Xenophobia* di Afrika Selatan. Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kalangan akademis khususnya, dan untuk masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Penelitian

1.3.1.1 Manfaat Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan serta, dapat menambah referensi keilmuan Hubungan Internasional, juga berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimanaperkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid.Hal ini bisa dijadikan pembelajaran untuk mengetahui dan memahami implementasi demokrasi secara ideal dalam sebuah negara.

1.3.1.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi bagi peneliti dengan tema yang sama, serta menambah wawasan bagi mahasiswa serta dosen, untuk memberikan pengetahuan khususnya mengenai bagaimana perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah penelitian pembanding dengan penelitian yang sedang dikaji, bentuk–bentuk penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti dalam penelitian, sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu jurnal dari *Norman Duncan* dengan judul “*Reaping the whirlwind: XenophobiaViolence in South Africa*” dalam jurnal tersebut menjelaskan asumsi bahwa pengalaman pasca apartheid (khususnya pengalaman traumatogenik) dan bertujuan untuk memeriksa sifat kekerasan rasisme yang dilakukan oleh masyarakat kulit hitam yang dilembagakan. Afrika

Selatan di bawah tatanan apartheid pada masa lampau dan efeknya pada masa kini kepada fungsi individu dan kelompok di Afrika Selatan kontemporer. Norman Duncan mengumpulkan narasi pengalaman selama periode apartheid Afrika Selatan yang berkulit hitam dan putih, perwakilan elit dan kategori sosial yang terpinggirkan, tindakan rasis, dan trauma. Tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin narasi selama periode tiga sampai lima tahun dari berbagai sektor masyarakat Afrika Selatan terutama dari kelompok pingiran. Tentu saja, sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap orang asing, sangat penting untuk secara tajam mengeksplorasi persepsi orang-orang Afrika Selatan tentang bagaimana masa lalu dan masa kini mempengaruhi tanggapan mereka terhadap orang asing.¹³ Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu berfokus pada konflik *Xenophobia* dan dampak bagi masyarakat kulit hitam dari konflik *Xenophobia* tersebut sedangkan penulis berfokus pada evaluasi perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid dengan mengambil studi kasus konflik *Xenophobia*.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu Jurnal dari Mavivi Myakayakaya Manzini dengan judul “perempuan diberdayakan perempuan dalam parlement Afrika Selatan” dalam Jurnal tersebut representasi perempuan dalam parlemen bukanlah masalah isu kesetaraan dan ketidakberpihakan itu juga merupakan masalah pemanfaatan sumber daya karena perempuan dapat berkontribusi terhadap perkembangan politik. Misalnya di Afrika Selatan kontribusi perempuan

¹³Norman Duncan, *Reaping the whirlwind: Xenophobic violence in South Africa*, University of the Witwatersrand, Johannesburg South Africa, diakses dalam <http://www.gicpp.org/pdfs/V3i1-0011%20Duncan.pdf> (26/9/2017, 15:01 WIB)

dalam penyusunan konstitusi Afrika Selatan saat ini sangatlah penting. Tanpa diragukan lagi keberadaan perempuan dalam parlemen mendorong perempuan untuk bercita-cita menjadi pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Argumen ini berfokus pada kemampuan perempuan untuk membuat kebijakan yang lebih baik apabila diberi kesempatan kepada mereka. Representasi perempuan juga memainkan peran penting dalam menarik wanita lain ke institusi pengambilan keputusan politik yang tinggi. Misalnya di Afrika Selatan, anggota parliement perempuan dapat membawa peningkatan jumlah perempuan dalam pertanggungjawaban karena mereka berada dalam posisi untuk mengatasi kemunduran yang menghambat perempuan dari partisipasi politik.¹⁴ Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu membahas pada peran perempuan dalam parlemen di Afrika Selatan sedangkan penulis membahas masalah keadaan masyarakat kulit hitam pasca apartheid di Afrika Selatan.

Penelitian terdahulu yang ketiga Skripsi Imar Savitri dengan judul “Anilasa Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Berakhirnya Politik Apartheid dalam Film *Invictus* Karya Sutradara Clint Eastwood” dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui representasi akhir dari politik apartheid dalam film *Invictus* disutradarai oleh Clint Eastwood. usaha untuk menggambarkan warisan politik apartheid dilakukan dengan memadukan kode-kode dalam level realitas, level representasi dan menggabungkan keduanya sehingga muncul dalam level ideologi seperti yang terdapat dalam *The Codes of*

¹⁴Mavivi M. Manzini, *Perempuan Diberdayakan—perempuan dalam parlemen di Afrika Selatan*, diakses dalam <http://www.idea.int/sites/default/files/publications/perempuan-di-parlemen-bukan-sekedar-jumlah.pdf> (26/9/2017, 20:03WIB)

Television John Fiske. Pemilihan kode–kode dilakukan sedemikian rupa sehingga film dapat ditangkap sebagai peristiwa yang nyata dan merepresentasikan berakhirnya politik apartheid kepada penonton.¹⁵ Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui representasi akhir dari politik apartheid dalam film *Invictus* dengan menggunakan analisa semiotika sedangkan penulis berfokus pada evaluasi perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid dengan menggunakan konsep demokrasi substantif.

Penelitian terdahulu yang keempat yaitu Abdul Rasyid Sahar dengan judul “Diplomasi Publik Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010” dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pemerintah Afrika Selatan membuktikan bahwa Afrika Selatan mampu menyelenggarakan piala dunia 2010 sebagaimana negara–negara maju yang sebelumnya telah sukses menyelenggarakannya. Pemerintah Afrika Selatan ingin membangun citra positif sebagai bangsa demokratis karena selama berpuluh–puluh tahun masyarakat internasional mengenal Afrika Selatan sebagai negara dengan sistem politik apartheid atau pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Dengan apartheid warga kulit hitam sangat terpingirkan, hampir pada sektor kehidupan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi sangatlah memprihatinkan.¹⁶ Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu berfokus pada pemerintah Afrika Selatan melakukan atau menyelenggarakan piala dunia 2010

¹⁵Imar Savitri, *Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Berakhirnya Politik Apartheid Dalam Film Invictus Karya Sutradara Clint Eastwood*, Universitas Komputer Indonesia, diakses dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/630/jbptunikompp-gdl-imarsavitr-31465-12-unikom_i-1.pdf (27/9/2017, 2:17 WIB)

¹⁶Abdul R. Sahar, *Diplomasi Publik Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010*, Univesitas Hasanuddin Makassar, diakses dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3538/skripsiabdulrasyidsahar.pdf> (27/9/2017, 3:06 WIB)

dengan tujuan agar masyarakat internasional tidak lagi memandang Afrika Selatan sebagai negara yang menganut politik apartheid sedangkan peneliti membahas tentang walaupun politik apartheid telah dihapuskan masih terdapat kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih dan dampak apartheid tersebut membuat masyarakat kulit hitam trauma akan orang asing dan hal tersebut menjadipemicu terjadinya konflik *Xenophobia*.

Penelitian terdahulu yang kelima yaitu Jurnal Vusi Gumede dengan Judul “*Social and Economic Transformation in Post-Apartheid South Africa – policies, progress and proposals*” dalam jurnal tersebut ialah sejauh mana warisan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diciptakan oleh politik apartheid bisa diatasi. Visi ANC untuk masa depan ekonomi dan negara yang berkelanjutan infrastrukturnya yang akan semakin meningkat kualitas hidup masyarakat Afrika Selatan. pemerintahan yang dipimpin ANC telah melakukan reformasi kebijakan yang luas dalam upaya untuk megubah masyarakat. Tujuan umum ANC yang terus berlanjut ialah: mempersatukan masyarakat, non-rasial, demokratis, dan sejahtera. Meskipun pembangunan, ekonomi, pengangguran, dan pendidikan membaik namun semua sektor tersebut belum cukup membuat kesejahteraan masyarakat Afrika Selatan.¹⁷ perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu berfokus pada kebijakan pemerintah Afrika Selatan dalam mensejahterakan masyarakatnya sedangkan penulis ingin mengetahui apakah

¹⁷Vusi gumede, *Social and Economic Transformation in Post-Apartheid – Policies, Progress and Proposals*, the Thabo Mbeki African Leadership Institute, diakses dalam [http://www.vusigumede.com/content/Paper%20on%20socio-economic%20transformation%20in%20SA%20\(draft,%20April%202013\).pdf](http://www.vusigumede.com/content/Paper%20on%20socio-economic%20transformation%20in%20SA%20(draft,%20April%202013).pdf) (27/9/2017,4:07 WIB)

dihapusnya politik apartheid tersebut bisa membawa masyarakat Afrika Selatan ke arah yang lebih baik.

1.1 Tabel Posisi Penelitian

No.	Nama/Judul	Metodelogi dan Pendekatan	Hasil
1.	(Jurnal) Norman Duncan/ <i>Reaping the whirlwind: Xenophobic violence in South Africa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanatif - Menganalisa dan Menjelaskan penyebab konflik <i>Xenophobia</i> - Pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber - Analisa data 	<p>Seperti tercermin dari kejadian pada 2008, <i>Xenophobia</i> selalu memerlukan tindakan dan proses kekerasan, fisik, baik secara psikologis maupun sosial.</p> <p>Sebagian besar insiden <i>Xenophobia</i> yang telah melanda Afrika Selatan sebelum dan setelah Mei 2008 secara konsisten terjadi karna masalah ekonomi dan sosial kota-kota yang tertekan, sebuah kota ditandai dengan kemiskinan dan masyarakatnya yang putus asa dan brutal.</p> <p>Secara proporsional mengacu pada kota tempat pembuangan manusia yang terpinggirkan dan terasingkan.</p>
2.	(Jurnal) Mavivi Myakayakaya–Manzini/Perempuan Diberdayakan — Perempuan dalam Parlemen di Afrika Selatan	<ul style="list-style-type: none"> -Deskriptif - Berusaha menganalisa dan menjelaskan terkait posisi perempuan dalam parlemen di Afrika Selatan pasca Apartheid - Pengumpulan data - Analisa data 	<p>Menjelaskan Peningkatan partisipasi politik perempuan merupakan hasil dari dua faktor</p> <p>utama: pertama, ia adalah hasil perjuangan para perempuan dalam Kongres Nasional Afrika (ANC) yang terlibat aktif selama beberapa dasawarsa dalam perjuangan untuk pembebasan nasional dan emansipasi sosial; dan</p>

			<p>kedua,</p> <p>merupakan hasil dari mekanisme kebijakan dan tindakan afirmatif yang diterapkan oleh ANCPengaruh kebijakan politik dalam penggunaan Blackwater</p> <p>Banyak anggota parlemen perempuan terus berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan tuntutan pekerjaan yang masih</p> <p>memasukkan jam lembur, perjalanan dan fasilitas yang sangat sedikit</p>
3.	<p>(Skripsi) Imar Savitri/Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Berakhirnya Politik Apartheid Dalam Film Invictus Karya Sutradara Clint Eastwood</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanatif - Berusaha memaparkan tentang berakhirnya politik apartheid - Pengumpulan data - Analisa siomatika 	<p>Melalui film invictus menyampaikan pesan bahwa politik apartheid adalah sesuatu yang harus dihapuskan melalui film</p> <p>Permasalahan apartheid bisa diselesaikan melalui hal yang sangat tidak diduga , yakni olahraga rugby.</p> <p>Kaum kulit putih merasa dirinya dihargai keberadaannya oleh Negara dan kaum kulit putih maupun kaum kulit hitam bersama-sama tumbuh dan berkembang dalam rasa saling memiliki.</p>

4.	(Skripsi) Abdul Rasyid Sahar/Diploma si Publik Afrika Selatan dalam Piala Dunia 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanatif - Konsep Diplomasi - Konsep Diplomasi Publik - Berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan Afrika Selatan yang positif di mata internasional - Pengumpulan data melalui studi pustaka - Analisa data 	<p>Afrika Selatan ingin membuat citra positif sebagai sebuah negara yang bermartabat, bermartaba, dan demokratis karena selama berpuluh–puluh tahun masyarakat internasional mengenalnya sebagai negara dengan sistem politik rasial berbasis warna kulit atau Apartheid</p> <p>Melalui piala dunia 2010 ini Afrika Selatan ingin memaparkan kepada dunia bahwa di Afrika Selatan, politik apartheid sudah ditiadakan</p> <p>melalui rekonsiliasi nasional yang dibangun, pemimpin Afrika Selatan di bawah kuasa Nelson Mandela memaafkan semua pemimpin dan orang–orang yang berafiliasi dalam politik apartheid</p>
5.	(Jurnal) Vusi Gumede/ <i>Social and Economic Transformation in Post–Apartheid South Africa</i> – <i>policies, progress and proposals</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanatif - Menganalisa dan menjelaskan perubahan sosial dan ekonomi Afrika Selatan pasca apartheid - Pengumpulan data melalui studi pustaka - Analisa data 	<p>Perekonomian stabil pada pertengahan tahun 2000, pembangunan sosial meningkat. Namun, dari perspektif kebijakan, Afrika Selatan telah turun secara signifikan.</p> <p>Reformasi yang diperlukan dalam ekonomi telah lemah karena pengembangan kebijakan yang buruk dan kurangnya visi ekonomi. Dalam perkembangan sosial, dikemukakan bahwa kurangnya kebijakan sosial telah menghambat kemajuan kesejahteraan.</p>

6.	(Skripsi) Hariadi/Evaluasi Perkembangan Demokrasi Afrika Selatan Pasca Apartheid (Studi Pada Konflik Xenophobia di Afrika Selatan Tahun 2008– 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Konsep Demokrasi Substantif - Pengumpulan data melalui studi pustaka dan internet 	<p>Berakhirnya apartheid masih meninggalkan dampak sosial yang cukup kontroversial di Afrika Selatan, seperti pengangguran, tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, kemiskinan yang mengakibatkan kriminalitas seperti pencurian dan kekerasan, dan dampak sosial tersebut banyak menimpa kaum kulit hitam dan segelintir orang kulit putih yang ada di Afrika Selatan.</p> <p>Meskipun ekonomi Afrika Selatan sudah stabil namun tidak terlalu banyak perubahan dari tahun ketahun, tingkat pertumbuhan ekonominya terhenti dari menurunnya perdagangan ekonomi global dan manajemen ekonomi Afrika Selatan yang sangat buruk mengakibatkan sebagian mayoritas penduduk kulit hitam masih hidup dalam kemiskinan.</p> <p>Meski apartheid telah berakhir dan sudah menjadi sejarah namun apartheid belum sepenuhnya hilang dan hanya bertransformasi bentuknya yang sekarang diarahkan kepada para imigran, hal ini juga disetujui oleh penulis sebagai faktor utama kemunculan Xenophobia.</p>
----	---	--	---

1.5 Landasan Teori

Menurut Joseph Schumpeter demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin–peminpin politik yang bersaing meraih suara. Diantara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin–pemimpi politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.¹⁸

Seperti Robert Dahl yang mengemukakan bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus–menerus terhadap preferensi atau keinginan warga di negaranya. Dari pernyataan ini tentu inisiatif rakyat menjadi sumbernya dimana ada liberalisasi dan partisipasi yang tinggi dari warga negaranya. Hubungan antara pemerintah dengan warganya membuat pola saling ketergantungan di dalamnya. Warga negara membutuhkan pemerintah dalam mengatur dan menjamin kesejahteraan para warganya dan begitu pula sebaliknya pemerintah membutuhkan warganya untuk tetap berada di kursi pemerintahan. Namun tanggung jawab lebih besar dipikul oleh pemerintah yang harus selalu tanggap dan menerima serta melaksanakan aspirasi warga negaranya.¹⁹

Seperti Seymour Martin Lipset yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara, dalam pandangan Martin Lipset syarat untuk terjadinya demokratisasi suatu negara ialah pertumbuhan perekonomian negara tersebut, tanpa pertumbuhan ekonomi yang

¹⁸Sorensen, Op. Cit., Hal. 14

¹⁹Richard W. Krouse, *Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl*. Diakses dari <http://people.brandeis.edu/~wooll/krousedahl.pdf> (2/4/2016, 2:37 WIB)

berkembang maka sangat sulit terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Efek dari pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggiring suatu negara ke arah yang modern.²⁰

Seperti yang dikemukakan oleh Larry Diamond bahwasanya kondisi-kondisi dimana tingkat pendidikan dan pendapatan perkapita yang relatif rendah, keragaman atau konflik etnis yang tidak terbatas. Variabel-variabel inilah sebagai faktor yang mendorong atau faktor penghambat suatu demokrasi. Agar demokrasi terkonsolidasi, para elit, organisasi, dan masyarakat, harus percaya bahwa sistem politik yang dimilikinya layak dipatuhi dan dipertahankan. Demokrasi yang lebih baik ialah dimana proses pembuatan berbagai keputusan selalu melibatkan banyak orang. Semakin sering melakukan konsultasi dengan konstituen sebelum membuat kebijakan, maka semakin bagus praktik demokrasi yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan tersebut.²¹

Demokrasi diartikan tidak hanya mengenai hal-hal yang menyangkut prosedural atau mekanisme, namun esensi dan nilai-nilai demokrasi juga menjadi jantung dalam kerangka demokratisasi itu. Penerapan simbol-simbol demokrasi yakni dengan pemilihan umum, multi partai, pers, sampai lembaga non-pemerintah serta kelompok penekan hanya sebagian usaha dalam menetapkan sistem demokrasi di suatu negara. Demokrasi sesungguhnya dimaknai sebagai kebebasan setiap individu maupun kelompok di berbagai tahapan kehidupan namun tetap memiliki batasan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum

²⁰Seymour M. Lipset, *Some Social Requisites Of Democracy: Economic Development and Democracy*. Diakses dari http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/lipset_1959.pdf (15/12/2016, 18:05 WIB)

²¹Larry Diamond, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation, 1*, Yogyakarta: IRE Press, hal. 67.

yang diterapkan di suatu negara juga lahir berdasarkan keputusan dan konsensus dari rakyat dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kebebasan setiap rakyat di sini bukan hanya sekedar bebas mengemukakan pendapat, bebas memilih, juga bebas berorganisasi tetapi lebih kepada kebebasan diri dalam hal non-politik yakni untuk menimbulkan rasa aman, keadilan setiap rakyat dalam kehidupan sosial, terbebas dari kemiskinan, juga hak-hak bersosialisasi di masyarakat.

Kebebasan dalam dimensi non-politik seperti sosial, ekonomi, juga budaya akan melahirkan situasi yang kondusif dalam kaitannya dengan berpolitik. Hal – hal non-politik ini akan berdampak pada kelancaran dalam dinamika politik untuk usaha menyelaraskan pendapat dan usaha dalam pengambilan keputusan. Para pemikir seperti Rousseau, John Stuart Mill sampai Karl Marx juga berpendapat bahwa ketimpangan sosial-ekonomi merupakan kendala bagi persamaan politik dan demokrasi.²² Esensi demokrasi yang merupakan implementasi sejati dari demokrasi itu sendiri yakni stabilitas sosial-ekonomi akan menunjang stabilitas politik yang tentunya juga harus ada kebebasan berpolitik di dalamnya.

1.5.1 Demokrasi Substantif

Demokrasi Substantif adalah landasan yang digunakan dalam menganalisa fenomena di Afrika Selatan ini. Melalui pendekatan normatif-maksimalis yang dimana ada pemikir seperti Martin Lipset, Barrington Moore, hingga Pzeworski, bahwa pendekatan klasik normatif ini lebih banyak membicarakan ide-ide dan model-model demokrasi secara substantif.

²²Suyatno. 2008. *Menjelajahi demokrasi*. Bandung, Indonesia: Humaniora. hal. 38–39

Demokrasi dijadikan sebagai sumber wewenang dan tujuan akhir yang dicapai melalui proses modernisasi.

Pada demokrasi substantif ini kondisi sosial masyarakat menjadi titik pembahasan, dimana ada tiga variabel utama yang berbasis pada kondisi sosial tersebut, yaitu ekonomi yang makmur dan merata, kelas menengah yang kuat, dan budaya politik yang sudah demokratis pada poin ini toleran dan akomodatif terhadap perbedaan. Pada pendekatan normatif–maksimalis ini juga konstitusi menjadi unsur yang tidak bisa dipisahkan. Konstitusi diperlukan dalam demokrasi untuk membatasi kewenangan dari pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta menentukan hak dan kewajiban dari rakyat dalam perannya sebagai warga negara. Dalam konstitusi tersebut secara tekstual dimuat dua ide besar, yang pertama konstitusionalisme mencakup pembatasan kekuasaan menurut doktrin trias politica (eksekutif, legislatif, yudikatif). Kedua, konstitusionalisme mencakup pemberian jaminan hak–hak sipil dan politik pada warganegara.²³

Pada point pertama yakni pembatasan kekuasaan, melalui bentuk demokrasi, pembentukan dalam pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan menghindari kekuasaan yang sentralistik dan fungsi setiap lembaga yang berbeda akan membatasi kewenangan lembaga tersebut dan mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan. Para pengambil keputusan ini juga harus mematuhi prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh

²³Suyatno, *Ibid* hal. 39

rakyat. Point kedua menyangkut pemberian jaminan hak sipil dan politik membuat warganegara tersebut memiliki jaminan untuk berpartisipasi pada kegiatan – kegiatan politik dalam hal ini berbicara dalam dinamika politik, mengajukan pendapat atau aspirasi, memilih partai atau calon pemimpin di pemerintahan serta kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi atau partai. Serta hak-hak dalam hal kehidupan sosial yakni hak memperoleh kehidupan yang layak, bebas dari rasa takut, sejahtera dan bebas dari diskriminasi.

Pendekatan normatif-klasik ini dengan maksimal memasukkan segala unsur penunjang bentuk demokrasi baik yang bersifat politik sampai pada hal-hal diluar dinamika politik hingga seluruh aspek demokrasi baik secara prosedural maupun esensi dapat diimplementasikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari para pemegang kuasa negara maupun protes dari masyarakat bawah sebagai bentuk ketidakpuasan. Seperti pemikir klasik J.J Rousseau yang berpendapat bahwa sejarah manusia telah melalui empat tahap,²⁴ yakni pertama adalah tahap primitive atau awal kehidupan manusia ketika manusia hidup dalam suasana damai, harmonis dan bebas dari segala bentuk dominasi. Kedua, pembentukan inti masyarakat atau keluarga-keluarga sehingga tersusunlah suatu masyarakat. Dalam tahap ini untuk pertama kalinya terbentuk lembaga hak milik pribadi. Ketiga, penemuan metalurgi dan pertanian yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan antara orang yang

²⁴Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Widiasarana. Hal.115

kaya dan orang yang miskin. Pada tahap ini untuk pertama kali timbul ketimpangan dalam pemilikan harta benda. Keempat, sebagai akibat ketimpangan dalam pemilikan harta benda maka timbul konflik antara orang kaya dan orang miskin dan konflik itu menimbulkan kekacauan sosial.

Tahap keempat dari uraian Rousseau yang bisa dihubungkan pada kondisi di beberapa negara bahwa ketimpangan sosial akan menimbulkan kekacauan yang tentu akan berdampak pada stabilitas negara di berbagai sektor termasuk pada bidang politik. Para rakyat yang selalu menuntut kesejahteraan dan keadilan akan menghambat negara tersebut untuk menjadi negara yang demokrasi. Selain karena konflik yang terjadi, rakyat yang tidak merasa aman, tidak merasa mendapat keadilan dan kemiskinan yang masih menghantui menjadi alasan tidak demokratisnya negara tersebut jika dari sudut pandang esensi demokrasi.

Konsep Demokrasi Substantif ini digunakan peneliti untuk melihat perkembangan demokrasi di Afrika Selatan pasca apartheid. Konsep ini dianggap tepat untuk menjelaskan bagaimana perkembangan demokrasi Afrika Selatan, dimana dalam konsep ini mengatakan ada tiga variabel utama yang membuat demokrasi berjalan dengan baik yaitu ekonomi yang makmur dan merata, kondisi sosial kelas menengah yang kuat, dan budaya politik yang sudah demokratis (toleran dan tidak adanya perbedaan warna kulit). Karena dari tiga variabel inilah peneliti bisa mengevaluasi perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid berjalan dengan baik atau

sebaliknya. Terjadinya konflik *Xenophobia* dilatar belakangi oleh terjadinya ketimpangan dari tiga variabel tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini berfokus pada penjabaran fenomena yang sedang diteliti yang akan memberi hasil pemahaman tentang fenomena yang menjadi topik penelitian ini.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Data-data yang diuraikan terlebih dahulu, dan dianalisis baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan dan data variabel inti akan diuji dengan teori atau konsep.²⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan kajian literature, baik dengan eksplorasi bahan-bahan kepustakaan, bahan-bahan dari berbagai artikel majalah, mass media/surat kabar, berbagai pendapat tokoh ahli dan pengamat hubungan internasional. Disamping itu penelitian juga dilakukan dengan menelusuri situs-situs Internet yang sekiranya relevan dengan penelitian dan juga situs-situs yang valid atau terpercaya.²⁶

²⁵ “Metode Penelitian Deskriptif,” elib.unikom.ac.id, diakses dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/602/jbptunikompp-gdl-meiambarsa-30082-11-unikom_m-3.pdf, (15/12/2017, 19:05 WIB)

²⁶ Ibid.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berisi batasan waktu dan batasan materi. Peneliti akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan.

1.7 Batasan Waktu

Ruang lingkup penelitian batasan waktu, penulis akan membahas evaluasi perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid studi pada konflik *Xenophobia* di Afrika Selatan 2008 bertujuan untuk mengetahui apakah demokratisasi Afrika Selatan pasca berakhirnya apartheid berjalan dengan baik.

1.8 Batasan Materi

Ruang lingkup penelitian batasan materi, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas evaluasi perkembangan demokrasi Afrika Selatan pasca apartheid studi pada konflik *Xenophobia* di Afrika Selatan. Penelitian ini menjelaskan proses demokratisasi pasca dihapusnya politik apartheid apakah mampu membawa Afrika Selatan pada suatu bentuk negara demokratis yang menjalankan demokrasi tidak hanya pada prosedural yaitu implementasi yang bersifat *tangible* seperti pemilu tetapi juga secara substansial dimana nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan sepenuhnya.

1.9 Argumen Sementara

Berakhirnya apartheid masih meninggalkan dampak sosial yang cukup kontroversial di Afrika Selatan, seperti pengangguran, tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, kemiskinan yang mengakibatkan kriminalitas seperti pencurian dan kekerasan, dan dampak sosial tersebut banyak menimpa kaum kulit hitam dan segelintir orang kulit putih yang ada di Afrika Selatan. Dari segi pemerintahan pasca wafatnya mantan presiden Nelson Mandela, partai ANC mengalami keretakan karena masyarakat menganggap Thabo Mbeki selaku pemimpin ANC pada tahun 2008 belum bisa menjadi sosok pemimpin yang bisa diharapkan. Terbukti dari pemilu tahun 2014 hak suara ANC mengalami penurunan menjadi 62% perolehan suara.

Meskipun ekonomi Afrika Selatan sudah stabil namun tidak terlalu banyak perubahan dari tahun ketahun, tingkat pertumbuhan ekonominya terhenti dari menurunnya perdagangan ekonomi global dan manajemen ekonomi Afrika Selatan yang sangat buruk mengakibatkan sebagian mayoritas penduduk kulit hitam masih hidup dalam kemiskinan. Meskipun dalam sejarah pendidikan Afrika Selatan telah mencapai kesuksesan namun masih belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Afrika Selatan dikarenakan minimnya lapangan kerja. Meskiapartheid telah berakhir dan sudah menjadi sejarah namun apartheid belum sepenuhnya hilang dan hanya bertransformasi bentuknya yang sekarang diarahkan kepada para imigran, hal ini juga disetujui oleh penulis sebagai faktor utama kemunculan *Xenophobia*. Seharusnya negara yang demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan setiap individu maupun kelompok di berbagai

tahapan kehidupan namun tetap memiliki batasan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Kebebasan setiap rakyat di sini bukan hanya sekedar bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas memilih, bebas berorganisasi tetapi lebih kepada kebebasan diri dalam hal non-politik yakni untuk menimbulkan rasa aman, keadilan setiap rakyat dalam kehidupan sosial, terbebas dari kemiskinan, juga hak-hak bersosialisasi di masyarakat.



1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none">1.1 Latar Belakang1.2 Rumusan Masalah1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none">1.3.1 Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none">1.3.1.1 Manfaat Akademis1.3.1.2 Manfaat Praktis1.4 Penelitian Terdahulu<ul style="list-style-type: none">1.4.1 Tabel Posisi Penelitian1.5 Landasan Teori<ul style="list-style-type: none">1.5.1 Demokrasi Substantif1.6 Metodologi Penelitian<ul style="list-style-type: none">1.6.1 Metode Penelitian1.6.2 Teknik Analisa Data1.6.3 Teknik Pengumpulan Data1.6.4 Ruang Lingkup Peneliti1.7 Argumen Sementara1.8 Sistematika Penulisan
BAB II SEJARAH APARTHEID DI AFRIKA SELATAN DAN XENOPHOBIA	<ul style="list-style-type: none">2.1 Sejarah Apartheid di Afrika Selatan2.2 Upaya Afrika Selatan Untuk Lepas Dari Apartheid2.3 Kemunculan Xenophobia Pasca Apartheid

BAB III PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI AFRIKA SELATAN	3.1 Bidang Politik 3.2 Perkembangan Politik Pada Masa Nelson Mandela Dan Thabo Mbeki 3.2.1 Rekonsiliasi Nasional 3.2.2 Kebijakan Dalam Negeri 3.2.3 Partai Politik Dan Pemilu 3.2.4 Kebebasan Berpendapat 3.3 HAM 3.4 Bidang Ekonomi 3.4.1 Kesejahteraan 3.4.2 Sumber Ekonomi Ekonomi Afrika Selatan 3.4.2.1 Pertanian 3.4.2.2 Pertambangan 3.4.2.3 Manufaktur 3.4.3 Produk Domestik Bruto 3.4.4 Lapangan Pekerjaan
BAB IV PERKEMBANGAN DAN KONDISI SOSIAL AFRIKA SELATAN PASCA APARTHIED	4.1 Perkembangan Sosial 4.1.1 Pendidikan 4.1.2 Tingkat Pengangguran 4.1.3 Kriminalitas 4.1.4 Kemiskinan 4.1.5 Xenophobia Sebagai Warisan Apartheid

BAB V PENUTUP	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

